



Merajut Konflik: Memahami Dinamika Pembangunan Di Wadas Melalui Perspektif Hukum Dan Masyarakat

Dewi Sinta ¹, Salsabila Amalia Putri Yoesvizar ²

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 07 November 2024
Revised : 13 November 2024
Accepted: 19 November 2024

This study analyzes the conflict case in Wadas from the perspectives of law and society using a qualitative approach. The article outlines the background of the conflict, legal considerations, analysis of societal perspectives, identification of tension points, conflict resolution efforts, and recommendations for sustainable management. Qualitative research methods were employed, focusing on literature review and descriptive data analysis. The findings emphasize the importance of a holistic approach that considers both legal and societal aspects in addressing similar conflicts in the future. It is hoped that the results of this study will provide comprehensive insights into the conflict and serve as a basis for more effective subsequent actions.

Keywords: Conflict, Development, Wadas.

(*) Corresponding Author: ds5549872@students.unnes.ac.id

How to Cite: Sinta, D., & Yoesvizar, S. A. P. (2024). Merajut Konflik: Memahami Dinamika Pembangunan Di Wadas Melalui Perspektif Hukum Dan Masyarakat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545581>.

PENDAHULUAN

Proyek-proyek pertambangan, pembangunan waduk, atau proyek sejenis seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama terkait dengan analisis dampak lingkungan dan pembebasan lahan. Analisis dampak lingkungan menyoroti risiko kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat dari aktivitas proyek tersebut. Sementara itu, pembebasan lahan sering kali memunculkan konflik dengan masyarakat lokal yang kehilangan tanah mereka, terutama jika hak kepemilikan atau penggunaan tradisionalnya tidak diakui, yang juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi proyek juga dapat menimbulkan ketidakpuasan, protes, atau resistensi, sementara komunikasi yang buruk antara pemangku kepentingan dapat memperburuk ketegangan. Selain itu, proyek-proyek besar seperti ini seringkali melibatkan risiko keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitarnya jika tidak dikelola dengan baik, serta mungkin tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai pihak, dengan fokus pada pengelolaan dampak lingkungan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan, untuk memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan manfaat jangka panjang yang seimbang bagi semua pihak terlibat.

Permasalahan ini menggambarkan kompleksitas dan sensitivitas yang melekat pada proyek-proyek pembangunan, khususnya terkait dengan dampak lingkungan dan pembebasan lahan. Bukan hanya sekedar tugas teknis yang harus

diselesaikan, tetapi menjadi isu yang memiliki potensi untuk memicu konflik yang signifikan, seperti yang diidentifikasi oleh Maimunah pada tahun 2002. Konflik sering muncul dalam konteks analisis dampak lingkungan ketika proyek tersebut mengancam ekosistem lingkungan atau kelestarian lingkungan secara keseluruhan. Ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan seringkali menjadi pemicu utama dalam menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pembebasan lahan juga menjadi sumber potensi konflik, karena masyarakat lokal merasa terancam dengan kehilangan tanah mereka, yang seringkali merupakan sumber kehidupan dan identitas budaya mereka. Dalam konteks ini, masalah ini melampaui dimensi teknis perencanaan proyek, dan menuntut pendekatan yang lebih holistik, cermat, dan berkelanjutan dalam penanganannya, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Konflik sering terjadi ketika warga yang merupakan pemilik tanah tidak puas dengan aspek pembebasan tanah, terutama terkait dengan kompensasi yang mereka terima atau dengan pertimbangan terkait produktivitas tanah dalam jangka panjang. Kompensasi pembebasan tanah sering menjadi pemicu ketegangan karena warga mungkin merasa bahwa kompensasi yang mereka terima tidak sebanding dengan nilai sebenarnya dari tanah mereka atau tidak cukup untuk mengganti kerugian yang mereka alami akibat kehilangan tanah tersebut. Selain itu, pertimbangan mengenai produktivitas tanah dalam jangka panjang juga dapat menjadi sumber konflik, terutama jika warga merasa bahwa proyek yang dilakukan akan merusak kesuburan atau kegunaan tanah dalam jangka panjang, yang dapat berdampak negatif pada mata pencaharian mereka atau kesejahteraan generasi mendatang. Konflik semacam ini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan dan kekhawatiran warga dalam proses pembebasan lahan, serta pentingnya mengadopsi pendekatan yang adil dan transparan dalam menentukan kompensasi dan mengelola dampak jangka panjang proyek terhadap produktivitas tanah dan mata pencaharian lokal.

Di Wadas, Purworejo, situasi serupa terjadi. Sebagaimana dilaporkan oleh berbagai media, rencana pembangunan pertambangan dan waduk di Desa Wadas, Purworejo, telah menimbulkan konflik yang serius. Konflik ini pecah ketika sebagian warga menentang rencana aktivitas penambangan batu andesit. Penolakan tersebut tercermin dalam serangkaian aksi protes, yang pada akhirnya mengarah pada bentrokan antara warga dengan aparat keamanan. Dalam aksi protes ini, keberatan warga sangat jelas terhadap proyek pembangunan bendungan dan penambangan batu andesit yang dijadwalkan. Mereka menentang proyek-proyek ini karena menganggapnya akan merugikan masyarakat setempat, baik dari segi lingkungan maupun sosial-ekonomi. Konflik semacam ini menyoroti pentingnya mendengarkan dan memahami kekhawatiran serta aspirasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan, serta menegaskan perlunya dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Kawasan Wadas, yang oleh warga dianggap bukan sebagai wilayah pertambangan, menghadapi beberapa kekhawatiran yang menjadi dasar penolakan mereka terhadap rencana pembangunan. Pertama, kekhawatiran akan potensi bencana alam seperti tanah longsor, yang telah diungkapkan oleh Wardana pada

tahun 2022, menjadi salah satu perhatian utama. Warga takut bahwa aktivitas pertambangan dapat memicu tanah longsor dan mengancam keselamatan mereka serta lingkungan sekitar. Kedua, tata ruang yang tidak memprioritaskan Wadas sebagai lahan pertambangan juga menjadi salah satu alasan penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa warga percaya bahwa wilayah mereka lebih cocok untuk kegiatan lain, seperti pertanian atau pemukiman, daripada pertambangan. Ketiga, meskipun pemerintah telah menyosialisasikan bahwa proyek bendungan merupakan prioritas untuk meningkatkan irigasi dan ketahanan pangan dengan mengairi lahan pertanian seluas 15.069 hektar, seperti yang diungkapkan oleh KPIP pada tahun 2018, tetapi penolakan warga tetap kuat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun manfaat jangka panjang seperti ketahanan pangan diakui, kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh proyek tersebut masih lebih dominan bagi warga. Penolakan warga yang tetap kuat, seperti yang disampaikan oleh Sibuea pada tahun 2022, menegaskan perlunya dialog lebih lanjut antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal untuk memahami dan menangani keprihatinan mereka dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka yang mencakup buku dan sumber informasi lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Mohamed Shaffril dkk. (2020). Pendekatan kualitatif mengarah pada pengumpulan dan analisis data deskriptif dalam bentuk teks, seperti yang dijelaskan oleh Coates (2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena atau masalah yang sedang diteliti dari sudut pandang yang mendalam dan menyeluruh. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam tentang persepsi, pandangan, dan pengalaman individu atau kelompok terkait topik penelitian. Ini sering dilakukan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen, seperti buku dan artikel. Dalam hal ini, penelitian ini mengandalkan tinjauan pustaka sebagai sumber utama data. Analisis deskriptif merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan informasi secara detail dan jelas tentang karakteristik atau fenomena yang diamati, tanpa upaya untuk menggeneralisasi hasil. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan secara mendalam, sehingga memungkinkan untuk memahami konteks yang lebih luas dari topik penelitian.

PEMBAHASAN

A. Analisis Tinjauan Hukum dan Masyarakat dari Kasus Wadas

Kasus Wadas mencerminkan kompleksitas dan ketegangan yang sering muncul dalam proyek pembangunan antara kepentingan pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal. Desa Wadas, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai wilayah pertambangan oleh masyarakat setempat, menjadi pusat kontroversi karena rencana pembangunan pertambangan dan waduk yang diusung oleh pemerintah dan pengembang proyek. Konflik dimulai ketika sebagian warga menolak rencana aktivitas penambangan batu andesit yang dijadwalkan akan dilakukan di daerah mereka. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran akan

potensi dampak lingkungan yang merugikan, seperti risiko tanah longsor yang meningkat, serta ancaman terhadap keberlanjutan mata pencaharian tradisional masyarakat lokal. Meskipun pemerintah telah memperkenalkan rencana pembangunan bendungan sebagai bagian dari proyek tersebut, dengan tujuan meningkatkan irigasi dan ketahanan pangan melalui pengairan lahan pertanian seluas 15.069 hektar, penolakan warga tetap kuat. Serangkaian aksi protes bahkan berujung pada bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara aspirasi pembangunan infrastruktur dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan masyarakat lokal. Warga merasa bahwa proyek-proyek tersebut akan merugikan lingkungan dan mata pencaharian mereka, sementara pemerintah dan pengembang proyek mungkin melihatnya sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, penanganan kasus Wadas memerlukan pendekatan yang holistik, memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, dan memastikan bahwa keputusan pembangunan diambil dengan memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pentingnya menganalisis kasus Wadas dari perspektif hukum dan masyarakat tak dapat diabaikan karena hal ini memungkinkan pemahaman yang lebih holistik tentang akar permasalahan serta penemuan solusi yang berkelanjutan. Dari segi hukum, analisis diperlukan untuk menilai kesesuaian rencana pembangunan dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk undang-undang lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan memeriksa konsistensi dan kepatuhan pemerintah serta pengembang proyek terhadap ketentuan hukum, kita dapat menilai apakah proses pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan lingkungan. Dari perspektif masyarakat, analisis diperlukan untuk memahami persepsi, kepentingan, dan kekhawatiran masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan tersebut. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi akar permasalahan, memahami nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat, serta mendapatkan wawasan tentang bagaimana keputusan pembangunan memengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses analisis, kita dapat menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, serta memastikan dukungan yang lebih luas untuk implementasi solusi tersebut. Dengan demikian, menganalisis kasus Wadas dari dua perspektif ini memberikan landasan yang kokoh untuk mencari solusi yang berkelanjutan, yang memperhitungkan baik aspek hukum maupun kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal.

Tinjauan terhadap kerangka hukum yang mengatur proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan menjadi krusial dalam memahami bagaimana proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai dan adil. Kerangka hukum ini mencakup berbagai regulasi, seperti undang-undang lingkungan hidup, tata ruang, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Dalam konteks kasus Wadas, penting untuk meninjau apakah rencana pembangunan pertambangan dan waduk sesuai dengan undang-undang yang ada. Misalnya, undang-undang lingkungan hidup memuat ketentuan tentang perlindungan lingkungan dan kewajiban pengelolaan dampak lingkungan dari proyek-proyek pembangunan. Selain itu, kerangka hukum tata ruang mengatur penggunaan lahan dan penataan ruang wilayah yang mencakup aspek pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Evaluasi terhadap konsistensi dan kepatuhan pemerintah serta pengembang proyek terhadap ketentuan-ketentuan ini menjadi penting dalam menilai legalitas dan keberlanjutan pelaksanaan proyek pembangunan. Dengan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, kita dapat memastikan bahwa keputusan pembangunan diambil dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat, prinsip-prinsip keadilan, serta perlindungan lingkungan hidup untuk keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, tinjauan terhadap kerangka hukum menjadi landasan penting dalam menjalankan proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Tinjauan terhadap kerangka hukum yang mengatur proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek hukum yang relevan. Kerangka hukum ini mencakup berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur berbagai aspek dari proses pembangunan, seperti perlindungan lingkungan, tata ruang, hak-hak masyarakat, dan pertimbangan keberlanjutan. Salah satu aspek utama dalam tinjauan hukum adalah memeriksa kesesuaian proyek dengan undang-undang lingkungan hidup. Undang-undang ini menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah dan pengembang proyek untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, sebelum memulai proyek, seringkali diperlukan analisis dampak lingkungan untuk mengevaluasi konsekuensi potensial dari proyek tersebut terhadap lingkungan sekitar. Evaluasi ini harus memperhitungkan berbagai faktor, termasuk pengaruh terhadap udara, tanah, air, flora, fauna, dan masyarakat lokal. Selain itu, peraturan tata ruang juga menjadi fokus dalam tinjauan hukum. Peraturan ini mengatur penggunaan lahan dan penataan ruang wilayah dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tinjauan terhadap peraturan tata ruang membantu memastikan bahwa lokasi proyek pembangunan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, penting juga untuk meninjau bagaimana proyek tersebut memengaruhi hak-hak masyarakat setempat. Hal ini termasuk hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Tinjauan ini memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati dan perlindungan yang memadai diberikan kepada mereka dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan proyek.

Selain aspek-aspek hukum yang disebutkan di atas, tinjauan terhadap kerangka hukum juga melibatkan evaluasi terhadap konsistensi dan kepatuhan pemerintah serta pengembang proyek terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini mencakup memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan telah diikuti dengan benar, izin yang diperlukan telah diperoleh, dan persyaratan lingkungan telah dipenuhi. Secara keseluruhan, tinjauan terhadap kerangka hukum yang mengatur proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan adalah langkah yang penting dalam memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan menghormati hak-hak masyarakat setempat, kita

dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus Wadas, undang-undang lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan hak-hak masyarakat memainkan peran penting dalam menentukan keberlanjutan dan keadilan dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Pertama, undang-undang lingkungan hidup menjadi landasan hukum utama yang mengatur perlindungan lingkungan dari dampak negatif pembangunan. Undang-undang ini mengharuskan pemerintah dan pengembang proyek untuk melakukan analisis dampak lingkungan sebelum memulai proyek. Dalam konteks Wadas, analisis dampak lingkungan harus mengidentifikasi dan mengevaluasi konsekuensi potensial dari aktivitas pertambangan batu andesit dan pembangunan waduk terhadap lingkungan sekitar, termasuk risiko tanah longsor dan kerusakan habitat. Selain itu, tata ruang juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Peraturan tata ruang mengatur penggunaan lahan dan penataan ruang wilayah dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam kasus Wadas, penting untuk meninjau apakah lokasi proyek pembangunan tersebut sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan dalam peraturan tata ruang. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang ada dan tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan. Perlindungan hak-hak masyarakat lokal juga menjadi fokus penting dalam kasus Wadas. Hak-hak masyarakat termasuk hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Dalam konteks pembangunan di Wadas, masyarakat memiliki hak untuk dilindungi dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh proyek-proyek tersebut, serta hak untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah mereka.

Dengan menganalisis undang-undang lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan hak-hak masyarakat dalam kasus Wadas, kita dapat mengevaluasi kepatuhan pemerintah dan pengembang proyek terhadap ketentuan hukum yang ada, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan dipertimbangkan dengan serius dalam proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan di Wadas dan wilayah-wilayah lainnya. Pentingnya konsistensi dan kepatuhan pemerintah dan pengembang proyek terhadap ketentuan hukum yang ada tidak dapat dilebih-lebihkan karena hal ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berbasis pada hukum. Konsistensi mengacu pada kesesuaian tindakan atau kebijakan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kepatuhan mengacu pada ketaatan pemerintah dan pengembang proyek terhadap hukum yang ada, termasuk pengambilan tindakan yang sesuai dengan ketentuan tersebut. Dalam konteks pembangunan, konsistensi dan kepatuhan pemerintah dan pengembang proyek terhadap ketentuan hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, adalah kepatuhan terhadap persyaratan prosedural yang diatur oleh hukum. Ini termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dalam perencanaan, persetujuan, dan pelaksanaan proyek, seperti pengajuan izin, pengumpulan analisis

dampak lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, adalah konsistensi dengan ketentuan substansial yang diatur oleh hukum. Ini melibatkan pemastian bahwa proyek-proyek tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, seperti hak lingkungan hidup, hak-hak masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Misalnya, proyek pembangunan harus memenuhi standar lingkungan yang telah ditetapkan, mengambil tindakan untuk meminimalkan dampak negatif, dan memberikan kompensasi yang wajar bagi masyarakat yang terkena dampak. Selanjutnya, penting juga untuk meninjau konsistensi dan kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat lokal. Ini termasuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap informasi, partisipasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan mereka. Tindakan yang tidak konsisten atau tidak patuh terhadap ketentuan hukum dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat lokal. Ini dapat menciptakan konflik, memperburuk ketidakadilan, dan merusak kepercayaan pada proses pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemerintah dan pengembang proyek tetap berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, konsistensi dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang ada adalah prasyarat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Analisis terhadap persepsi, kepentingan, dan kekhawatiran masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan di Wadas sangat penting untuk memahami dinamika konflik dan mencari solusi yang berkelanjutan. Masyarakat lokal memiliki beragam pandangan dan kepentingan terkait dengan proyek pembangunan, yang mencakup kekhawatiran akan dampak lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian, dan keamanan. Pertama, kekhawatiran akan dampak lingkungan menjadi salah satu isu utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat lokal. Mereka khawatir bahwa proyek pembangunan, seperti pertambangan batu andesit dan pembangunan waduk, akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk kerusakan habitat, penurunan kualitas udara dan air, serta meningkatnya risiko bencana alam seperti tanah longsor. Masyarakat merasa perlu untuk melindungi lingkungan mereka dan melestarikan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, keberlanjutan mata pencaharian menjadi perhatian utama bagi masyarakat lokal di Wadas. Mereka khawatir bahwa proyek pembangunan dapat mengganggu atau bahkan mengancam mata pencaharian tradisional mereka, seperti pertanian, perikanan, atau peternakan. Masyarakat mengandalkan sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup mereka, dan mereka takut bahwa proyek pembangunan dapat merusak atau mengurangi akses mereka terhadap sumber daya tersebut, yang pada gilirannya dapat mengancam keberlanjutan ekonomi dan sosial mereka. Terakhir, kekhawatiran terkait keamanan juga menjadi perhatian serius bagi masyarakat lokal. Proyek pembangunan yang besar sering kali membawa perubahan sosial dan infrastruktur yang signifikan ke wilayah tersebut. Masyarakat khawatir bahwa peningkatan aktivitas pembangunan dapat meningkatkan tingkat kriminalitas,

konflik sosial, atau bahkan mengancam keselamatan mereka secara langsung. Selain itu, mereka mungkin juga merasa tidak aman karena potensi konflik dengan pihak-pihak yang mendukung proyek pembangunan.

Dengan memahami dan menganalisis persepsi, kepentingan, dan kekhawatiran masyarakat lokal ini, pemerintah dan pengembang proyek dapat merancang strategi yang lebih baik untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola konflik. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang terbuka, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan kekhawatiran mereka merupakan langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berdasarkan pada kepentingan bersama. Tinjauan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek pembangunan di Wadas penting untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat lokal tercermin dalam keputusan yang dibuat. Partisipasi masyarakat merupakan prinsip penting dalam pembangunan berkelanjutan, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat yang akan terdampak.

Proses partisipasi masyarakat dapat meliputi berbagai langkah, seperti penyediaan informasi yang jelas dan transparan tentang proyek-proyek yang direncanakan, konsultasi dengan masyarakat untuk mendengarkan pandangan mereka, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pembuatan keputusan. Dalam konteks Wadas, penting untuk mengevaluasi apakah pemerintah dan pengembang proyek telah memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek-proyek tersebut. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan masyarakat tercermin dalam keputusan yang dibuat. Ini berarti bahwa pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat lokal, serta memprioritaskan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan mereka. Namun, seringkali dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menjadi terbatas atau bahkan terabaikan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses informasi, ketidaksetaraan dalam kekuatan dan akses terhadap sumber daya, serta kurangnya komitmen pemerintah dan pengembang proyek untuk mendengarkan suara masyarakat.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Wadas menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan kesempatan perbaikan. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa suara mereka diakui dalam proses pengambilan keputusan, kita dapat memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal, serta menciptakan hasil yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Identifikasi titik-titik ketegangan antara hukum dan kepentingan masyarakat merupakan langkah penting dalam memahami dinamika konflik yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek. Titik-titik ketegangan ini dapat timbul ketika ada perbedaan antara ketentuan hukum yang berlaku dan keinginan, kebutuhan, atau kekhawatiran masyarakat lokal. Beberapa contoh titik ketegangan yang umum meliputi:

1. Hak atas tanah dan pembebasan lahan: Ketika pemerintah atau pengembang proyek berencana untuk menggunakan lahan yang dimiliki atau dihuni oleh masyarakat lokal untuk proyek pembangunan, terjadi ketegangan terkait hak atas tanah dan pembebasan lahan. Masyarakat mungkin menuntut kompensasi yang lebih adil atau menolak pengusiran dari tanah mereka tanpa persetujuan yang memadai.
2. Dampak lingkungan: Konflik dapat muncul ketika proyek pembangunan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan habitat alam, pencemaran udara atau air, atau risiko bencana alam. Masyarakat lokal mungkin bersikeras pada perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, sementara pemerintah atau pengembang proyek mungkin lebih memperhatikan kepentingan ekonomi atau politik.
3. Partisipasi dalam pengambilan keputusan: Jika masyarakat merasa bahwa mereka tidak terlibat secara cukup dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek, konflik dapat muncul. Masyarakat mungkin menuntut lebih banyak transparansi, konsultasi yang lebih luas, atau pengakuan terhadap pengetahuan lokal mereka dalam proses tersebut.

Potensi dampak dari titik-titik ketegangan ini terhadap pelaksanaan proyek dapat sangat signifikan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat menghambat kemajuan proyek, memperlambat investasi, atau bahkan menghentikan proyek secara keseluruhan. Selain itu, konflik dapat merusak hubungan antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal, serta menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi titik-titik ketegangan ini secara awal dalam perencanaan proyek dan mencari solusi yang memadai yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak. Pendekatan kolaboratif dan berbasis pada dialog, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan kebutuhan lingkungan, dapat membantu mengurangi konflik dan memastikan kelancaran pelaksanaan proyek yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pemaparan upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan mencakup berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Salah satu upaya utama yang sering dilakukan adalah melalui dialog antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal. Dialog ini bertujuan untuk membuka jalur komunikasi, memahami kekhawatiran dan kebutuhan masing-masing pihak, dan mencari solusi bersama yang dapat mengatasi ketegangan dan konflik yang ada. Dalam dialog tersebut, pemerintah dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator untuk memfasilitasi diskusi yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat. Pengembang proyek juga dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan dialog yang terbuka dan inklusif, serta menunjukkan komitmen mereka untuk mendengarkan dan merespons kekhawatiran masyarakat lokal. Di sisi lain, masyarakat lokal juga diharapkan terbuka untuk berpartisipasi dalam dialog, menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi mereka secara jelas, serta bersedia untuk mencari solusi kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain dialog, upaya penyelesaian konflik juga dapat melibatkan mekanisme alternatif, seperti mediasi atau negosiasi, yang memungkinkan semua

pihak untuk bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan. Penggunaan mediator independen atau mediator dari lembaga non-pemerintah dapat membantu mengurangi ketegangan dan memfasilitasi pembicaraan yang lebih terbuka dan produktif. Prospek keberhasilan dari upaya-upaya penyelesaian konflik ini tergantung pada sejumlah faktor. Pertama, penting untuk adanya komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keterbukaan, kejujuran, dan kesediaan untuk mendengarkan serta memahami posisi dan kepentingan masing-masing pihak juga sangat diperlukan. Selain itu, proses penyelesaian konflik yang berhasil biasanya melibatkan adanya kompromi dan kesediaan untuk mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Namun, prospek keberhasilan juga dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor lain, termasuk dinamika politik dan kekuatan relatif antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal. Selain itu, kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat juga dapat memengaruhi kemungkinan tercapainya kesepakatan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua faktor ini dalam mengevaluasi prospek keberhasilan dari upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan.

B. Kasus Wadas Dalam Perspektif Teori Hukum dan Masyarakat

1. Teori Konflik Sosial

Dalam kajian kasus Wadas, teori konflik sosial dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika konflik yang terjadi antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal. Teori ini memandang konflik sebagai hasil dari ketidaksetaraan atau ketidakpuasan dalam distribusi sumber daya atau kekuasaan di masyarakat. Dalam konteks Wadas, konflik muncul karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Masyarakat lokal mungkin menginginkan menjaga lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian mereka, sementara pemerintah atau pengembang proyek memiliki tujuan untuk melaksanakan proyek pembangunan seperti pertambangan atau pembangunan bendungan. Perbedaan ini menciptakan ketegangan yang mungkin berkembang menjadi konflik.

Teori konflik sosial juga mengakui bahwa konflik dapat muncul dari ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya atau peluang. Dalam kasus Wadas, masyarakat lokal mungkin merasa bahwa keputusan terkait proyek pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka secara adil. Hal ini dapat menyebabkan perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan, yang merupakan pemicu potensial bagi konflik. Dengan memahami konflik melalui lensa teori konflik sosial, analisis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik, pola-pola interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan strategi yang mungkin digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang mempromosikan keadilan dan keberlanjutan. Ini melibatkan upaya untuk memahami dinamika kekuasaan, distribusi sumber daya, dan faktor-faktor struktural lainnya yang memengaruhi konflik, sehingga memungkinkan untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Teori Partisipasi Masyarakat

Teori Partisipasi Masyarakat menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kasus Wadas, di mana konflik terjadi antara

pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal terkait proyek-proyek pembangunan, teori ini menjadi sangat relevan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek tersebut mungkin menjadi penyebab utama konflik. Masyarakat lokal mungkin merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka tidak dipertimbangkan dengan serius dalam proses pengambilan keputusan. Mereka mungkin merasa diabaikan atau bahkan dirugikan oleh keputusan yang diambil tanpa keterlibatan mereka.

Dalam teori partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat dianggap sebagai cara yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan dan proyek pembangunan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat menyampaikan pandangan mereka, memberikan masukan, dan menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan yang terjadi di wilayah mereka. Dalam kasus Wadas, kekurangan partisipasi masyarakat dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap otoritas yang membuat keputusan. Hal ini dapat memperburuk ketegangan dan memperumit penyelesaian konflik. Oleh karena itu, memperbaiki tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk mengatasi konflik yang terjadi.

Dengan memperkuat partisipasi masyarakat, pemerintah dan pengembang proyek dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan, kekhawatiran, dan aspirasi masyarakat setempat. Ini memungkinkan mereka untuk merancang kebijakan dan proyek pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan memenuhi harapan masyarakat, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan.

3. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori yang menyoroti pentingnya memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pembangunan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang sangat relevan dalam konteks konflik di Wadas. Teori ini menekankan bahwa pembangunan yang sukses adalah yang memperhitungkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, sehingga dapat menciptakan keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam kasus Wadas, pertentangan antara pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan waduk atau pertambangan, dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan ini. Pemerintah dan pengembang proyek mungkin fokus pada manfaat ekonomi jangka pendek yang dapat diperoleh dari proyek-proyek pembangunan tersebut, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, atau peningkatan pendapatan daerah. Namun, terkadang manfaat ekonomi tersebut dapat bertentangan dengan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal. Misalnya, pembangunan waduk atau pertambangan dapat mengancam ekosistem lingkungan yang sensitif atau merusak mata pencaharian tradisional masyarakat lokal, seperti pertanian atau perikanan. Dalam hal ini, konflik muncul karena kebutuhan akan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi bertabrakan dengan kebutuhan akan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial masyarakat lokal.

Dengan menggunakan pendekatan ini, analisis dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta untuk menilai keseimbangan antara kebutuhan pengembangan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang. Langkah-langkah mitigasi yang mempertimbangkan kedua aspek ini dapat dirumuskan untuk mengurangi konflik dan mencapai hasil yang lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menyelesaikan konflik antara pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat lokal di Wadas. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini secara holistik, pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak dapat dicapai.

4. Teori Keadilan Lingkungan

Teori Perubahan Sosial adalah kerangka kerja yang mempelajari bagaimana masyarakat bereaksi terhadap perubahan dalam lingkungan fisik dan sosial mereka. Dalam konteks kasus Wadas, di mana konflik timbul antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal terkait pembangunan infrastruktur, teori ini dapat memberikan pemahaman yang dalam tentang dampak konflik terhadap struktur dan dinamika sosial masyarakat setempat, serta proses perubahan sosial yang mungkin terjadi sebagai hasil dari konflik tersebut.

Konflik yang terjadi di Wadas tidak hanya menciptakan ketegangan antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal, tetapi juga memengaruhi hubungan dan pola interaksi sosial di antara mereka. Teori Perubahan Sosial membantu untuk memahami bagaimana konflik tersebut mempengaruhi solidaritas sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial masyarakat setempat. Misalnya, konflik dapat memperkuat atau melemahkan solidaritas dan kepercayaan antara anggota masyarakat, mengubah norma-norma yang berlaku, atau bahkan merombak struktur kekuasaan dalam masyarakat. Selain itu, teori ini juga membantu dalam memahami proses perubahan sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konflik. Konflik dapat menjadi pemicu bagi perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat, baik itu dalam hal pola pekerjaan, pola migrasi, identitas budaya, atau pembentukan kelompok-kelompok sosial baru. Dengan memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengelola konflik dan memfasilitasi transformasi sosial yang positif.

Dengan menggunakan pendekatan teori perubahan sosial, kita dapat memahami konflik di Wadas sebagai bagian dari proses perubahan yang lebih luas dalam masyarakat setempat. Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat konflik tidak hanya sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, teori ini membantu kita untuk memahami dampak konflik secara holistik dan merumuskan strategi yang tepat untuk menanggapi tantangan yang dihadapi masyarakat setempat.

5. Teori Perubahan Sosial

Teori Perubahan Sosial merupakan kerangka kerja yang memfokuskan pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan fisik dan sosial mereka. Dalam konteks kasus Wadas, di

mana terdapat konflik antara pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat lokal terkait pembangunan infrastruktur, teori ini memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana konflik tersebut mempengaruhi struktur dan dinamika sosial masyarakat setempat, serta proses perubahan sosial yang mungkin terjadi sebagai hasil dari konflik tersebut.

Konflik di Wadas tidak hanya menghasilkan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pola interaksi dan struktur sosial di antara mereka. Teori Perubahan Sosial membantu untuk memahami bagaimana konflik tersebut memengaruhi solidaritas sosial, norma-norma, nilai-nilai, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat setempat. Misalnya, konflik dapat memperkuat atau melemahkan hubungan sosial antaranggota masyarakat, mengubah norma-norma perilaku yang ada, atau bahkan mengubah struktur kekuasaan di dalam masyarakat.

Selain itu, teori ini juga membantu dalam memahami proses perubahan sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat dari konflik tersebut. Konflik dapat menjadi pemicu bagi perubahan yang signifikan dalam masyarakat, seperti perubahan dalam pola pekerjaan, pola migrasi, identitas budaya, atau pembentukan kelompok sosial baru. Dengan memahami dinamika perubahan sosial yang terjadi, kita dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang muncul, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mengelola konflik dan memfasilitasi transformasi sosial yang positif.

Dengan menggunakan pendekatan teori perubahan sosial, kita dapat memahami konflik di Wadas sebagai bagian dari proses perubahan yang lebih luas dalam masyarakat setempat. Analisis ini memungkinkan kita untuk melihat konflik tidak hanya sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, teori ini membantu kita untuk memahami dampak konflik secara holistik dan merumuskan strategi yang tepat untuk menanggapi tantangan yang dihadapi masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Dalam konteks hukum, artikel membahas kerangka hukum yang mengatur proses perencanaan dan implementasi proyek pembangunan, termasuk tinjauan terhadap undang-undang lingkungan hidup, tata ruang, dan perlindungan hak-hak masyarakat. Evaluasi terhadap konsistensi dan kepatuhan pemerintah dan pengembang proyek terhadap ketentuan hukum menjadi fokus dalam memahami aspek hukum dari konflik. Dari perspektif masyarakat, artikel menganalisis persepsi, kepentingan, dan kekhawatiran masyarakat lokal terhadap proyek pembangunan di Wadas, termasuk dampak lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian, dan keamanan. Tinjauan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dilakukan untuk memahami sejauh mana kebutuhan dan keinginan mereka tercermin dalam keputusan yang dibuat. Selanjutnya, artikel mengidentifikasi titik-titik ketegangan antara hukum dan kepentingan masyarakat serta potensi dampaknya terhadap pelaksanaan proyek, sebelum membahas upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan prospek keberhasilannya. Rekomendasi yang disampaikan berdasarkan analisis hukum dan masyarakat bertujuan untuk penanganan konflik secara efektif dan berkelanjutan, termasuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memperkuat perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat lokal. Dalam kesimpulan, artikel merekapitulasi temuan dan rekomendasi dari analisis kasus Wadas, menekankan pentingnya pendekatan holistik yang memperhatikan baik aspek hukum maupun perspektif masyarakat dalam menangani konflik serupa di masa depan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan komprehensif dan mendalam tentang konflik tersebut serta menjadi landasan untuk tindakan lanjutan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pariyatman, M. H., Santoso, P., & Madjid, A. (2022). RESPEK DAN REKOGNISI: RESOLUSI KONFLIK WADAS: Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth. *Jurnal Komunikatio*, 8(2), 114-125.
- BUDIHARTO, I. (2022). Konflik Politik Agraria Di Desa Wadas Pasca Rencana Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman)
- Iqbal, M. (2022). PEREMPUAN DALAM KONFLIK AGRARIA: POLITIK PERLAWANAN GEMPADEWA (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI ALAM DESA WADAS) DALAM MENOLAK PENAMBANGAN QUARRY DI DESA WADAS KABUPATEN PURWOREJO (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Najib, A. M. G. (2022). *Objektivitas pemberitaan konflik pada portal berita online: Analisis Framing berita konflik Agraria di Desa Wadas pada Kompas. com dan Solopos. com, edisi 9-11 februari 2022* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Rahayu, R. S., Hidayati, U., Kom, S. I., & Kom, M. I. JURNALISME DAMAI DALAM MEDIA ONLINE (Analisis Pemberitaan Konflik Wadas pada Kompas. com dan Detik. com).
- Firamadhina, F. I. R., & Fauzi, M. R. (2023). REKOMENDASI RESOLUSI KONFLIK DI DESA WADAS MENGGUNAKAN METODE TINJAUAN PUSTAKA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5(1), 15-22.
- Anggraeni, R. M. (2022). Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif Yuridis Normatif. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Salsabila, A. S., Sefani, A., Kirsanto, T. N., Arsita, L. Y., & Nurdin, N. (2024). Konflik Agraria dan Keterlibatan Rezim Lokal pada Konflik Desa Wadas. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(1), 15-15.
- Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. *Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama*, 3(1), 32-48.
- Abdoellah, O. S. (2016). Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan. Gramedia Pustaka Utama.